

## Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa: Studi Di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2024

\* Desri Alzikri<sup>1</sup>, Andriyus<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : [desrialzikri@student.uir.ac.id](mailto:desrialzikri@student.uir.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas Pemerintah Desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, serta faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pengembangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Desa Koto Tibun masih terbatas, khususnya dalam kompetensi sumber daya manusia, efektivitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hambatan utama yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman terhadap regulasi, minimnya pelatihan, dan kurangnya publikasi informasi anggaran kepada masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan pelatihan aparatur desa, penguatan kelembagaan desa, serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran.

**Kata Kunci:** Kapasitas Pemerintah Desa, APBDes, Pengelolaan Keuangan Desa

### Abstract

This study aims to examine the capacity of the Village Government in managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Koto Tibun Village, Kampar Sub-district, Kampar Regency, including its inhibiting factors and efforts for improvement. The study employed a descriptive qualitative method, using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the capacity of the Koto Tibun Village Government is still limited, especially in terms of human resource competence, institutional effectiveness, community participation, as well as transparency and accountability of financial management. The main obstacles include limited understanding of regulations, lack of technical training, and inadequate dissemination of budget information. Recommended improvements include enhancing training for village officials, strengthening institutional structures, and optimizing community participation in budget planning and oversight.

**Keywords:** Village Government Capacity, APBDes, Village Financial Management

## PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi salah satu instrumen vital dalam proses pembangunan desa karena di dalamnya memuat perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola APBDes secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan APBDes. Permasalahan utama yang sering muncul antara lain adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa, lemahnya sistem pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta kurangnya infrastruktur pendukung, seperti sistem informasi dan teknologi administrasi keuangan desa.

Desa Koto Tibun merupakan salah satu desa yang memperoleh Dana Desa setiap tahunnya. Namun, implementasi pengelolaan APBDes di desa ini masih belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan observasi dan wawancara awal, ditemukan berbagai persoalan seperti keterlambatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), tidak sinkronnya program kegiatan dengan kebutuhan masyarakat, serta pelaporan keuangan yang masih manual dan sering tidak tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Desa Koto Tibun dalam pengelolaan keuangan desa masih perlu diperkuat, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun tata kelola kelembagaan.

Di sisi lain, keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh faktor internal pemerintah desa, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dukungan dari pemerintah daerah melalui bimbingan teknis dan pengawasan. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas aparatur desa menjadi hal yang sangat penting agar mampu menjalankan seluruh siklus pengelolaan APBDes sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas.

Dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan dana desa serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, dibutuhkan kemampuan manajerial yang mumpuni dari seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa. Pemerintah desa harus dapat memahami regulasi yang berlaku, menguasai sistem administrasi keuangan, serta membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. Penelitian ini berupaya menjawab sejauh mana kapasitas tersebut dimiliki oleh Pemerintah Desa Koto Tibun serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuatnya.

Mengingat pentingnya peran APBDes dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji kapasitas pemerintah desa dalam mengelola APBDes, mengidentifikasi berbagai faktor penghambat, serta merumuskan upaya strategis yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes di Desa Koto Tibun.

Faktor inilah yang mendorong peneliti untuk mendalami permasalahan ini, karena peneliti melihatnya sebagai isu yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis maupun praktis dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintah desa dan mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan Masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari perangkat desa dan masyarakat, observasi langsung terhadap proses pengelolaan APBDes, serta dokumentasi dari arsip keuangan desa. Lokasi penelitian berada di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan teknik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, ditemukan lima aspek utama yang menjadi indikator pengembangan kapasitas, yaitu: kapasitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, kapasitas finansial, kapasitas partisipatif, dan kapasitas adaptif.

### 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan APBDes di Desa Koto Tibun telah dilakukan, namun belum merata. Beberapa perangkat desa menunjukkan pemahaman yang baik dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi sebagian lainnya masih bergantung pada operator Siskeudes. Pelatihan dan pendampingan dari pihak kecamatan sudah pernah dilakukan, namun belum dilaksanakan secara berkala. Penguasaan terhadap sistem informasi keuangan desa juga masih terbatas pada satu atau dua orang. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi teknis secara menyeluruh.

### 2. Kapasitas Kelembagaan

Struktur organisasi Pemerintah Desa Koto Tibun secara formal telah terbentuk sesuai regulasi. Namun, masih ditemukan kendala dalam implementasi SOP pengelolaan anggaran. Tidak semua perangkat desa memahami dan menjalankan prosedur secara tertib. Koordinasi antarlembaga dan antarperangkat desa juga masih berjalan secara informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kelembagaan telah tersedia, penguatannya secara fungsional masih sangat dibutuhkan agar pelaksanaan tugas lebih efektif dan akuntabel.

### 3. Kapasitas Finansial

Dalam hal kapasitas finansial, Pemerintah Desa Koto Tibun telah menyusun APBDes berdasarkan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, transparansi penggunaan anggaran masih lemah. Masyarakat belum mendapatkan informasi terbuka mengenai jumlah dan penggunaan dana desa secara rinci. Selain itu, pelaporan keuangan belum melibatkan semua unsur pengawasan di desa seperti BPD. Ini menandakan perlunya pembenahan dalam aspek akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.

### 4. Kapasitas Partisipatif

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes masih rendah. Musyawarah desa lebih banyak dihadiri oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa, sedangkan masyarakat umum jarang dilibatkan secara aktif. Selain itu, belum ada media informasi yang digunakan secara maksimal untuk mensosialisasikan rencana dan realisasi anggaran desa. Minimnya keterlibatan ini menjadi tantangan tersendiri bagi desa untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

### 5. Kapasitas Adaptif

Pemerintah Desa Koto Tibun cukup responsif dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah, seperti aturan terbaru tentang penggunaan Dana Desa. Namun, dari sisi inovasi dan pembuatan kebijakan lokal berbasis kebutuhan masyarakat, masih terkesan pasif. Pemerintah desa belum optimal dalam merancang kebijakan desa secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas adaptif agar pemerintah desa mampu bersikap fleksibel, inovatif, dan cepat dalam menanggapi perubahan sosial dan regulasi.

Dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa di Desa Koto Tibun, terdapat beberapa hambatan yang diidentifikasi, antara lain:

- Kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan dari instansi terkait. Banyak perangkat desa yang tidak mengikuti pelatihan karena keterbatasan kuota atau informasi yang tidak merata.
- Minimnya pemahaman terhadap regulasi terbaru menyebabkan perangkat desa ragu dalam mengambil kebijakan dan cenderung menunggu petunjuk dari pemerintah di atasnya.
- Rendahnya budaya koordinasi internal, di mana perangkat desa belum terbiasa bekerja secara tim dan lebih banyak bekerja berdasarkan instruksi langsung dari pimpinan tanpa proses diskusi atau evaluasi.
- Keterbatasan fasilitas dan teknologi pendukung, seperti komputer, jaringan internet, atau software penunjang pengelolaan keuangan desa yang membuat beberapa program tidak berjalan optimal.

Hal ini sejalan dengan teori Grindle (1997) yang menyebutkan bahwa hambatan dalam pengembangan kapasitas sektor publik biasanya bersumber dari kelemahan internal birokrasi, rendahnya insentif, dan sistem pengelolaan yang belum efektif.

Meskipun terdapat hambatan, Pemerintah Desa Koto Tibun juga melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kapasitasnya, di antaranya:

- Meningkatkan komunikasi antarperangkat desa melalui rapat mingguan informal meskipun belum dijadwalkan secara sistematis.
- Membangun hubungan koordinatif dengan kecamatan dan pendamping desa, sebagai bentuk dukungan teknis dan administratif.
- Menggunakan media sosial desa (seperti grup WhatsApp warga dan Facebook desa) sebagai sarana awal menyampaikan informasi pembangunan dan penggunaan dana desa.
- Mendorong partisipasi melalui tokoh masyarakat untuk menjangkau kelompok warga yang belum aktif dalam kegiatan musyawarah atau pembangunan desa.

## SIMPULAN

1. Kapasitas Pemerintah Desa Koto Tibun dalam mengelola APBDes belum optimal, terlihat dari masih rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
2. Faktor penghambat utama dalam pengelolaan APBDes di Desa Koto Tibun meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan teknis, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran desa.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa antara lain melalui pelatihan aparatur secara berkelanjutan, penguatan kelembagaan desa, dan peningkatan transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Koto Tibun perlu rutin mengikuti pelatihan teknis terkait pengelolaan keuangan desa agar mampu memahami regulasi dan menyusun laporan anggaran secara akuntabel.
2. Diperlukan penguatan struktur kelembagaan desa, khususnya dalam pembagian tugas dan fungsi perangkat desa, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan APBDes.
3. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam musyawarah perencanaan dan pengawasan anggaran desa melalui transparansi informasi dan sosialisasi anggaran secara terbuka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wasistiono, S. (2007). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Fokusmedia.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kurniasih, N. & Sulaiman, M. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 23–32.
- Putri, R. D. & Santosa, A. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 45–53.
- Sutiyo & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Tokyo: Springer.
- Yustika, A. E. (2008). *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Fakih, M. (2002). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bappenas. (2020). *Pedoman Umum Dana Desa*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Effendi, T. (2013). *Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. Jakarta: UI Press.
- Rasyid, M. R. (2003). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Darmawan, D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syahyuti. (2007). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kadir, A. (2015). *Statistik Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan SPSS/Lisrel dalam Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.